

**ANALISIS TRANSPRANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN
DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDES) PADA DESA PINANG
BELARIK KECAMATAN UJANMAS
KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI



**Nama : Deni Aprizal
NIM : 22 2014 285**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS TRANSPRANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN
DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDES) PADA DESA PINANG
BELARIK KECAMATAN UJANMAS
KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Deni Aprizal
NIM : 22 2014 285**

**UNIVERSITAS MUHAMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni Aprizal

NIM : 222014285

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan pejiplakan (plagiat) karya orang lain. Apabila terbukti di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, 07-08-2019



Penulis,

Deni Aprizal

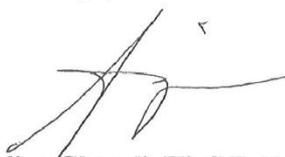
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) pada Desa Pinang Blarik
Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim.
Nama : Deni Aprizal
NIM : 22 2014 285
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Pablik

Diterima dan Disahkan
Pada tanggal2019

Pembimbing I,



Rosalina Ghazali, Hj. S.E.Ak, M.Si
NIDN/NBM:0228115802/0121961

Pembimbing II,



Mizan, S.E.Ak.,M.Si,CA
NIDN/NBM:020647101/859196

Mengetahui,
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi



(Betri, S.E.,M.Si.,Ak. CA)
NIDN/NBM:0216106902/944806
MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- *Bermimpilah Setinggi Langit Jika Anda Terjatuh, Jatuhlah Diantara Bintang-Bintang.*
- *Jika Anda Merasa Beruntung Jangan Terlalu Bangga Karna Disana Doa Kedua Orang Tuamu Terkabal*
- *Lakukan menurutkamu benar dan tinggalkan jika menurut kamu salah*

(Deni Aprizal)

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:

- ❖ *Ayah dan Ibuku Tercinta*
- ❖ *Saudara Kandungku*
- ❖ *Calon Makmum*
- ❖ *Pembimbing Skripsiku*
- ❖ *Sahabat*
- ❖ *Almamaterku*

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Mendengar Lagi Melihat atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016-2018 pada Desa Pinang Blarik Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim”. Skripsi tersebut untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, baik dalam pembahasan, analisa, materi pendukung, dan penelaahan materi ataupun tehnik penyusunan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan referensi yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk kesempurnaanya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Ahmad Basri dan Ibunda Komariah tercinta yang telah membesarkan, mendidik, mebiayai, mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada penulis dengan penuh cinta kasih sayang. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada ibuk Hj. Rosalina Ghazali, S.E.,AK.,M.Si dan

Mizan ,S.E.,M.Si.,AK.,CA yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu disampaikan juga terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi ini, dan tidak lupa penulis menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
3. Bapak Betri Sirajuddin S.E, AK.,M.Si.CA dan bapak Nina Sabrina S.E.,M.Si selaku ketua dan sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibuk Hj. Rosalina Ghazali, S.E.,AK.,M.Si dan Mizan ,S.E.,M.Si.,AK.,CA selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah mengarahkan serta memberikan saran yang berguna dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibuk Mela Handayani, S.E.,AK,M.Si selaku Pembimbing Akademik saya yang memotivasi dan memberikan dukungan kepada saya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kepada seluruh keluarga dan teman seperjuangan saya yang telah memberikan do'a serta dukungan.

8. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2019

Penulis

Deni Aprizal

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	11

1. Transparansi	11
a. Pengertian transparansi	11
b. Pengukuran Transparansi.....	13
2. Akuntabilitas	14
a. Pengertaian Akuntabilitas	14
b. Macam-Macam Akuntabilitas	15
3. Pengelolaan Keuangan Desa	16
a. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.....	16
4. Anggaran Desa	30
a. Pengertian Anggaran Desa.....	30
b. Jenis-Jenis Anggaran Desa	30
c. Fungsi Anggaran Desa.....	31
d. Proses Penyusunan Anggaran Desa.....	33
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	34
a. Pengertian Anggaran dan Belanja Desa.....	34
b. Peran Masyarakat Dalam Penyusunan APBDes.....	37
B. Penelitian Sebelumnya	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	43
C.Operasionalisasi Variabel.....	43

D. Data Yang Diperlukan.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data Dan Teknik Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	47
1. Gambaran Umum Desa Pinang Belarik.....	47
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pinang Belarik	48
3. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Pinang Belarik	49
B. Pembahasan Hasil Penelitian	56

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN.....	66
B. SARAN.....	67

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Desa	7
Tabel II.1 Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Sebelumnya	40
Tabel III.1 Operasional Variabel	43
Tabel IV.2 Hasil Wawancara Transparansi APBDes	58
Tabel IV.3 Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa.....	59
Tabel IV.4 Hasil Wawancara Akuntabilitas	60
Tabel IV.5 Hasil Wawancara Pengelolaan ABPDes	61
Tabel IV.6 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2016.....	63
Tabel IV.7 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2017.....	64
Tabel IV.8 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2018.....	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Selesai Riset

Lampiran 2 Sertifikat TOEFL

Lampiran 3 Sertifikat AIK

Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi

Lampiran 6 Biodata Penulis

ABSTRAK

Deni Aprizal/222014285/Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim /Akuntansi Sektor Publik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa Pinang Belarik kecamatan Ujanmas kabupaten Muara Enim. Tujuan penelitian untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa Pinang Belarik kecamatan Ujanmas kabupaten Muara Enim. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di desa Pinang Belarik kecamatan Ujanmas Kecamatan Muara Enim. Variabel yang digunakan adalah transparansi, akuntabilitas, pengelolaan APBDes. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa untuk keterbukaan terkait dana dan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, tidak adanya bukti tertulis informasi yang bisa diakses masyarakat. Untuk pengungkapan hasil kinerja yang dilakukan pemerintahan desa belum maksimal dan banyak masyarakat desa beranggapan banyak terjadi penyelewengan dana. Dalam pengelolaan keuangan desa yang diterapkan oleh pemerintahan desa pinang belarik sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku.

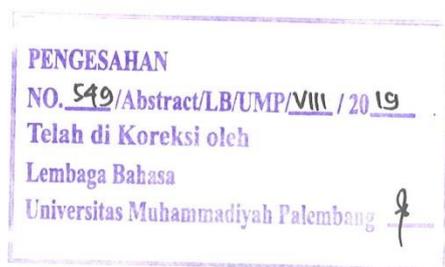
Kata Kunci: transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, pengelolaan anggaran, pendapatan belanja desa.

Abstract

Deni Aprizal / 222014285 / An Analysis of Transparency and Accountability of Village Government in Managing Village Budget and Revenue in Pinang Belarik Village Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim / Public Sector Accounting.

The formulation of the problem in this study was to know how was the transparency and accountability of village government in managing village budget and revenue in Pinang Belarik village Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim. The purpose of this study was to determine the transparency and accountability of village government in managing village budget and revenue in Pinang Belarik village Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim. This type of research used descriptive research. The research site was conducted in Pinang Belarik village Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim. The variables were transparency, accountability, APBDes management. The data in this study were primary and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews and documentation. The data analysis technique in this study was qualitative analysis. The results of the discussion showed that for openness related to funds and ongoing development activities, there was no written evidence of information that could be accessed by the public. For the disclosure of performance results made by the village government was not optimal and many villagers assume a lot of misappropriation of funds. In the management of village finances implemented by the government of Pinang belarik village, it was in accordance with the prevailing laws and regulations.

Keywords: transparency and accountability of village government, budget management, village expenditure income.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap organisasi, perusahaan, maupun kelompok lain dan individu. Anggaran merupakan suatu perencanaan dalam bentuk kuantitatif baik dari kegiatan dan mengkoordinasi serta mengimplementasikan kegiatan tersebut dari perencanaan yang dibuat. Anggaran sebagai salah satu alat bantu yang memegang peranan cukup penting, karena dengan anggaran yang baik maka dapat merencanakan dan sekaligus melakukan pengendalian terhadap jalan suatu aktivitas. Salah satunya adalah Anggaran Dana Desa.

Pelaksanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. APBDes dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Pada kenyataannya banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah data yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan

menurut Sumpeno (2011: 213), APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintah desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan.

Menurut Nurdiawan dalam V. Wiratna (2015: 28), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Mahmudi (2015: 9), akuntabilitas adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*).

Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang masih jauh dari prinsip-prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik yang di tandai dengan dua unsur yaitu keterbukaan atau transparansi dan unsur pertanggung jawaban atau akuntabilitas. Karena untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, harus diperhatikan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-

individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dapat menjawab dan memberi keterbukaan terhadap hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, managerial, dan program dalam pengelolaan pemerintahan desa terlebih khusus pengelolaan APBDes.

Transparansi dan akuntabilitas yang di maksud di atas jelas dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dan akuntabilitas ini tentunya harus benar-benar diterapkan dan mendapat perhatian yang serius dari semua *stake holders* yang ada di desa, baik itu pemerintah maupun masyarakat serta lembaga-lembaga swadaya yang ada di desa guna mencapai kemandirian desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan belanja desa, namun dalam hal ini lebih dititik beratkan pada peran pemerintah desa itu sendiri. Karena apabila melihat dari banyaknya kasus-kasus yang menjerat banyak penyelenggaran pemerintahan desa di Indonesia hampir seluruhnya terletak pada ketidaktransparanannya dan tidak akuntabelnya pengelolaan keuangan yang ada di desa masing-masing.

Permasalahan di atas tentunya dapat diminimalisir apabila setiap penyelenggaran pemerintah desa mampu menerapkan prinsip Keterbukaan atau taransparansi dan Akuntabilitas dalam setiap program baik itu sejak awal perencanaan yang biasanya di bicarakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) tingkat desa. Hingga tahap

penyelenggaraan program bahkan sampai penyelesaian program. Namun dalam penerapannya biasanya pemerintah desa kerap menemui kendala baik itu segi teknis maupun Sumber Daya manusia. Hal-hal yang di sebutkan di atas juga di hadapi Oleh Pemerintahan. karena apabila kita merujuk pada pengertian transparansi yang di kemukakan Oleh Mahmudi (2015: 224) transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti. Jadi transparansi adalah memberikan informasi pengelolaan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan jujur kepada masyarakat.

Faridah (2015) yang berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sidogedungbatu Kec. Sangkapura Kabupaten Gresik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa di Desa Sidogedungbatu kec. Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada Pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2013. Secara umum Transparansi dan Akuntabilitas di Desa Sidogedungbatu Kec. Sangkapura Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.

Zulfan (2014) yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana alokasi desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana

alokasi berjalan dengan baik dengan keseluruhan dimensi, termasuk dalam dimensi transparansi yang menunjukkan pengelolaan dana alokasi desa berjalan transparan hal ini terjadi karena adanya informasi yang mudah diakses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengelolaan dana alokasi desa dianggap transparan. Hal yang sama terjadi pada dimensi reability, responsibilitas dan responsivitas berjalan dengan baik tetapi pada dimensi control masih termasuk kategori cukup baik dan perlu di optimalkan untuk menunjang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pipit dan Purweni (2017) berjudul Akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas hukum dan kejujuran desa Garontelah berpedoman pada Undang-undang RI No.06 tahun 2014, peraturan menteri dalam negeri no.83,113 dan 114, peraturan pemerinta no.60 tahun 2014, dan peraturan bupati Magetan no.12 tahun 2015. Akuntabilitas manajerial pemerintah garon telah melibatkan masyarakat, seluruh perangkat desa, tim pelaksana, BPD,LPM dan karang taruna . Akuntabilitas program desa Garon dengan mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun program desa, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, BPK mempunyai kewajiban dan mandat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut. pada

saat ini terjadi bersamaan dengan perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan negara. Begitupun yang harus dilakukan oleh pemerintah desa jika ditarik pengertian transparansi diatas dan disinkronkan dengan pengertian akuntabilitas ini maka perlu adanya pelaporan data atau pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada lembaga terkait.

Transparansi mengisyaratkan bahwa Akuntabilitas/laporan pertanggungjawaban tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat.

Kabupaten Muara Enim adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten dengan penduduk lebih kurang 700.000 jiwa ini memiliki 22 Kecamatan. Salah satunya yaitu Kecamatan Ujanmas. Kecamatan Ujanmas Memiliki 8 Desa salah satunya desa Pinang Belarik. Desa Pinang Belarik memiliki diapit oleh desa Muara Gula dan Desa Ujanmas. Desa Pinang Belarik memiliki 2.045 jiwa dengan luas wilayah 69 KM², di Desa ini mayoritas penduduk sebagai petani karet.

Berikut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa Pinang Belarik Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim tahun 2016-2018

Tabel 1.1
Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Desa
Pinang Blarik Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016-2018

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	Rp 1.209.138.155,74	Rp 1.209.138.000	100
2	2017	Rp 1.652.049.195	Rp 1.652.049.115	100%
3	2018	Rp 1.835.068.625	Rp 1.810.284.304	98,64%

Sumber: APBDes Desa Pinang Blarik, 2018

Berdasarkan tabel 1.1 dapat di lihat jumlah anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pinang Blarik Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim periode 2016-2018. Pada tahun 2016 pemerintahan desa Pinang Belarik mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.209.138.155,74 dan semua anggaran terealisasi semua, pada tahun 2017 pemerintahan desa Pinang Belarik mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.652.049.195 dan dana dana terealisasi semua, sedangkan ditahun 2018 pemerintahan desa Pinang Belarik mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.835.068.625 dan terealisasi sebesar Rp. 1.810.284.304 dan dana sisa sebesar Rp. 24.784.321 dimasukan ketahun keanggaran berikutnya.

Transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes di Desa Pinang Blarik yaitu kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan

APBDes, banyaknya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah desa tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Fenomena ini memang sering terjadi dalam lingkup transparansi pengelolaan keuangan dikarenakan juga banyak masyarakat yang tidak mau ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang ada.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

APBDes ditujukan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan APBDes yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karna erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat. Dari berbagai permasalahan dan latar belakang yang dihadapi pemerintah desa pinang blarik kecamatan ujanmas kabupaten muara enim tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016-2018 pada Desa Pinang Blarik Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016-2018 pada Desa Pinang Blarik Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016-2018 pada Desa Pinang Blarik Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi penulis

Bagi Penulis penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Akuntansi Sektor Publik yaitu mengenai pentingnya Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan APBDes khususnya pada desa Pinang Blarik Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim.

2. Bagi Pemerintah Desa

Bagi pemerintah Desa diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan APBDes Desa untuk dapat

meningkatkan Akuntabilitas maupun Transparansi, sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat di desa Pinang Blarik Kecamatan Ujanamas Kabupaten Muara Enim

3. Bagi almamater

Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sanusi 2015 Penyelurn Dana Tidak Efisien
<https://www.keuangandesa.info/2015/11/penyaluran-dana-desa-tidak-efisien.html>
- Azuar Juliandi, Irfan & Saprizal Manurung. 2014 Metode Penelitian Konsep dan Aplikasi. Medan: UMSU PRESS
- Danang Sunyoto 2016. *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung Refika Aditama
- Dina Fitri Septarini dan Elisabeth Lia Riani Kore. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Gerbangku di Kampung Onggari Distrik Malind Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. VII, No. 1, April 2016.
https://media.neliti.com/media/publications/163103_ID_analisis_pengelolaan_keuangan_dana_gerba.pdf
- Faridah. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 4, No 5, 2015
- Hendra kurniawan 2014 akuntansi pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus di desa sukowilangun kecamatan kalipare kabupaten malang tahun 2014). Jurnal riset mahasiswa. ISSN: 2337_56xx 2014.
https://media.neliti.com/media/publications/190166_ID-akuntabilitas-pengelolaan-alokasi-dana-d.pdf
- Indra bastian 2015. Akuntabilitas sektor public. Jakarta
- Inten meutia dan liliana 2017. Pengelolaan keuangan dana desa. Jurnal akuntabilitas multiparadigma JAMAL Vol 8. ISSN: 2089_5879,
- Lina nasehatun nafidah dan nur anisa 2017. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten jambang. Jurnal ilmu akuntabilitas Vol. 10 ISSN: 1979_858.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Mardiasmo 2009. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Pipit Juliani. 2017. Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanaan Kabupaten Magetan. Jurnal Akuntansi Pendidikan. Vol 6, No. 2, 16 Oktober 2017,

Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Said Mahdani 2017. Dana Desa Aceh Barat dinilai Tidak Transparan

Saiful Efendi 2017. Alokasi Dana Desa Tak Transparan, Kades Baturaja Dituntut Turun Jabatan www.lidikkrimsusnews.com

Sompeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh: Read.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wiratna, V Sujarweni. 2015. Sistem Akuntansi. Pustaka Baru Press: Yogyakarta

V. Wiratna Sujawerni. 2015. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabaru press.

Zulfan Nahrudin. 2014. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Vol. IV, No. 2, Oktober 2014,
https://media.neliti.com/media/publications/163103_akuntabilitas-dan-trasparansi-pengelolaan-dana-alokasi.pdf